

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR
BENAI KECEMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKIRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapid dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara**



Oleh:

**Nama : CHINDY OKTARIA
NPM : 160411022**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

NAMA : Chindy Oktaria

NPM : 160411022

UNIVERSITAS : Islam Kuantan Singingi

FAKULTAS : Ilmu Sosial

JURUSAN : Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI : Administrasi Negara

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

RIKA RAMADHANTI S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II

ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 10220018302

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (stara satu), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun sekolah tinggi atau universitas lainnya;
2. Karya tulis ini adalah penelitian saya sendiri dan dibantu oleh dosen pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat pertimbangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan sanksi norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Teluk Kuantan, September 2020

Yang membuat pernyataan

CHINDY OKTARIA

160411022

MOTTO

"Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan dunia maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat!"

(Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu)

Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. Hal tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang penting

(Winston Churchill)

Jika kamu terlahir miskin, itu bukanlah kesalahanmu. Namun jika kamu meninggal dunia dalam keadaan miskin, maka itu adalah kesalahanmu.

(Bill Gates)

"Jangan Terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran"

(Albert Einstein)

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini kepada:

*Ayahanda tercinta Rizaldi dan Ibunda Yang kusayangi Deslimarlinda,
sebagai terimakasih atas semua jerih payah, perngorbanan serta
keringat yang kalian curahkan demi pendidikan anakmu yang
tidak akan mampu terbalaskan sampai kapanpun,
terimakasih Papa terimakasih mama atas doa
dan dukungan selama ini.*

Tidak lupa kepada Adikku Chintya Oktari Dan keluarga besarku dan
sahabat terbaik yang senantiasa memberikan doa dan dukungan
selama proses pendidikan berlangsung dan akhirnya dapat
mengelaskan karya yang sederhana ini.

Almamater tercinta Universitas Islam Kuantan Singingi

By: CHINDY OKTARIA

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR BENAI KECEMATAN BENAI

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh

CHINDY OKTARIA

160411022

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa Pemerintah dituntut kemandirianya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisi pengelolaan Retribusi pasar di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Henry Fayol Tentang Pengelolaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan 20 Informan yang berasal dari Para Pedagang dan Pengelolah Retribusi Pasar. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan Retribusi pasar di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Belum Terkelolah dengan Baik

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Pasar

ABSTRACT**ANALYSIS OF MANAGEMENT OF MARKET RETRIBUTION IN THE
MARKET OF BENAI, BENAI DISTRICT,
KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By
CHINDY OKTARIA

160411022

The considerations that underlie this research, is that the government is required to be independent in handling all funding matters, both for regional development and the implementation of regional governments. The large amount of funding for the implementation of autonomy forces local governments to seek alternative sources of regional income by exploring the potential of region in order to increase local revenue. One of the sources of regional revenue come from market retribution which is considered potential to increase local revenue. This study aims to determine the analysis of the management of market retribution in Benai Market, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The theory used in the research is Henry Fayol About Management. The research method used was qualitative with 20 informants who came from the traders and market retribution managers. The results of this study found that the management of market retribution in Benai Market, Benai District, Kuantan Singingi Regency has not well managed.

Keywords: *Management, Market Retribution*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang mana berkat Rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **“Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi”**

Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan buat Baginda Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amiin.

Pembuatan Skripso ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi

Pada penyusunan Skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. IbuIr. Hj. Elfi Indrawanis, MM sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singgingi
2. Bapak Zul Amar, SE. ME Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi.
3. Bapak Desriadi S,Sos. M,Si, sebagai Ketua Prodi Administrasi Negara.
4. Bapak Rika Ramadhanti, S.Ip M,Si sebagai Pembimbing 1 saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Alsar Andri, S.Sos M.Si sebagai Pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, Ayahanda (Rizaldi), Ibunda (Deslimarlinda) yang menanamkan ajaran bahwa “Hidup adalah sebuah perjuangan, setiap

keberhasila harus dilalui dengan sebuah perjuangan”, serta buat Adinda (Chintya Oktari) senantiasa memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi.
8. Bapak Camat Benai yang telah bersedia memberi saya Data yang saya perlukan
9. Untuk sahabat-sahabatku Novianti Cahyani, Dan Wiwin Widia Okvi yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi Negara angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Demikianlah, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapan terima kasih.

Teluk Kuantan, September 2020

Penulis

CHINDY OKTARIA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	6
BAB II: LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Kajian Pustaka	7
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	7
2.1.2.Teori/Konsep Manajemen.....	9
2.1.3.Teori/Konsep Prilaku Organisasi.....	11
2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan Publik.....	16
2.1.5 Teori/Konsep MSDM	19
2.1.6 Teori/Konsep Birokrasi.....	22
2.1.7 Teori/Konsep Good Governance	26
2.1.8 Teori/Konsep Pajak Daerah	29
2.1.9 Teori/Konsep Retribusi Daerah	32
2.1.10.Teori/Konsep Rtetribusi Pasar	37
2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
2.3 Hipotesis Kerja.....	39

2.4 Konsep Operational	40
2.5 Operational Variabel.....	41
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1.Jenis Penelitian.....	43
3.2.Informan Penelitian.....	43
3.3.Sumber Data.....	44
3.4.Fokus Penelitian.....	45
3.5.Lokasi Penelitian.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7.Teknik Analisis Data	47
3.8. Waktu Penelitian.....	48
BAB IV: GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN.....	49
4.1 Keadaan Geografi	49
4.2 Keadaan Penduduk.....	50
4.3 Pendidikan.....	52
4.4 Kesehatan.....	52
4.5 Agama	54
4.6 Pemerintahan Kecamatan Benai	54
BAB V: HASIL PENELITIAN	71
5.1 Identitas Informan Penelitian.....	71
5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin	71
5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur.....	71
5.1.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan	72
5.1.4 Informan Menurut Status Pekerjaan	73
5.2 Hasil Penelitian	74
5.2.1 Indikator Perencanaan (Planning),.....	79
5.2.2 Indikator Pengorganisasian (Organizing)	84
5.2.3 Indikator Kepemimpinan (Learning or Actuiting)....	90
5.2.4 Indikator Pengawasan (Controlling)	96
BAB VI: PENUTUP	99
6.1 Kesimpulan	99

6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Benai	
Tahun 2016-2019	3
Tabel 2.1: Operational Variabel Penelitian	41
Tabel 3.1: Tabel Informan Penelitian tentang Pengeloaan Retribusi	
Pasardi Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten	
Kuantan Singingi.....	44
Tabel 3.2: Rencana Kegiatan Penelitian tentang Analisis Pengelolaan	
Retribusi Pasar Di Pasar Benai Kabupaten Kuantan	
Singingi	48
Tabel 4.1: Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecematan Benai	
Kabupaten Kuantan Singingi	50
Tabel 4.2: Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Benai	51
Tabel 4.3: Sarana Pendidikan Kecematan Benai	52
Tabel 5.1: Karakteristik Informan di Lihat dari Jenis Kelamin	71
Tabel 5.2: Karakteristik Informan menurut Umur	72
Tabel 5.3: Karakteristik Informan menurut Tingkat Pendidikan	73
Tabel 5.4: Karakteristik Informan menurut status pekerjaan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka pemikiran	39
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kecematan	
Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan PAD. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain- lain PAD yang sah. Jenis-jenis pajak antara Lain:

a) Pajak Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkiran
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c) Bagi Hasil Pajak Provinsi
- Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan .
- Kesejahteraan masyarakat akan tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dikarenakan pendapatan asli daerah menjadisalah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.
- Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan di daerahnya melalui PAD. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi Pasar.

Pasar Benai merupakan salah satu desa yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa sumber PAD, Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena setiap tahunnya retribusi pasar mampu memberikan sumbangan cukup besar bagi pemerintah daerah khususnya pasar Benai.

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan badan pengurus pasar kepada para pengguna fasilitas sarana dan prasarana pasar. Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional bisa berupa pelataran, kios, lapak dan tariff pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan). Retribusi pasar yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pemerintah setempat untuk pedagang. Retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Retribusi pelayanan pasar juga digunakan untuk kebutuhan pasar seperti dana untuk kegiatan operasional maupun non operasional pasar. Hasil dari pemungutan pasar akan dikelolah dan disetor kepada kas daerah yang nanti dananya akan di gunakan untuk fasilitas pasar dan pembangunan daerah. Hasil dari pemungutan tarif retribusi pasar inilah yang di sebut pendapatan asli daerah.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi dalam meningkatkan PAD.

Penelitian ini, akan lebih spesifik membahas mengenai pengelolaan Retribusi pasar terhadap PAD di Pasar Benai. Penelitian ini difokuskan di Pasar Benai dengan alasan bahwa pemerintah di Pasar Benai merupakan salah satu pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten/Kota, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut adalah Retribusi Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasar Benai, Target dan Realisasi pajak Retribusi pasar sebagai berikut:

Tabel I.1: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Benai Tahun 2016-2019

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2016	RP. 14.550.000	RP. 13.000.000	69,00%
2017	RP. 15.300.000	RP. 15.000.000	73,21%
2018	RP. 15.420.000	RP. 17.400.000	112,84%
2019	RP. 15.420.000	RP. 12.600.000	56,36%

Sumber: Kantor Camat Benai 2020

Berdasarkan data tabel I.1, terlihat pada tahun 2016 hingga dengan 2017 realisasi penerimaan mengalami penurunan kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan kembali mengalami peningkatan dari Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 17.400.000 tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 12.600.000. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masih banyak potensi PAD yang belum maksimal pelaksanaannya, Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, di pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar. Di Pasar Benai yang merupakan salah satu pasar di Kecamatan Benai masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Benai. Kondisi-kondisi yang ada di Pasar Benai saat ini misalnya; masih kurangnya frekuensi penyapuan/pembersihan sampah, kurangnya saluran pembuangan sampah, jika musim penghujan lokasi masih sering becek yang menyebabkan tidak kondusifnya kondisi pasar. Selain itu terjadi kesemrawutan pedagang kaki lima yang tidak tertib di sekitaran. Juga masih terjadinya penggelapan dalam pemungutan retribusi, ketidaktahuan petugas dalam pemungutan retribusi tertentu sehingga membuat objek retribusi tidak terpungut dengan baik, tanggungjawab yang kurang sehingga mampu menyebabkan penyalahgunaan wewenang serta pelayanan yang kurang memadai

sedangkan kendala dari masyarakat seperti keterbatasan informasi tentang retribusi dan peraturannya, kesadaran masyarakat kurang terhadap retribusi, partisipasi masyarakat dalam retribusi daerah sangat kecil serta masyarakat lebih suka menggunakan fasilitas swasta seperti penarikan “keamanan” oleh oknum diluar Dinas yang menyebabkan objek retribusi menurun kemampuannya untuk membayar retribusi daerah, misal retribusi pasar. Di Pasar Benai harus meningkatkan target lagi agar mendorong peningkatan pendapatan dan realisasi dapat tercapai dengan baik kemudian memperbaiki sistem dalam pemungutan baik dalam segi intern dan ekstern karena menurut data yang penulis dapat dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah masih banyak jenis-jenis retribusi yang belum dipungut misalnya seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil belum ada pada daftar pemungutan retribusi pasar di Pasar Benai serta lebih melihat pada potensi yang mampu dikembangkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, oleh karena itu penlitit tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi dalam Mengelolah Retribusi Pasar Di Pasar Benai ini. Maka penulis meneliti yang berjudul.

“Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi”

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan Retribusi Pasar dan bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk meneliti permasalahan yang sama di Pasar Benai dengan masalah yang berbeda.
- 1.4.2 Memberikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam pengembangan masyarakat yang melibatkan Pengelolaan Retribusi Pasar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut adminitrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibumbuhinya oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung makna adanya ketetapan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Konsep adminitrasi oleh Waldo Iih (dalam Faried Ali 2015:187) adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran). Dalam konsep ini kerjasama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu terbentuk karena perimbangan rasio. Begitu banyak kegiatan terjadi atau kegiatan yang melibatkan manusia dengan manusia pada suatu kerja sama, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai “Konsep Administrasi”. Beberapa orang berkumpul disuatu tempat karena suatu peristiwa yang menarik misalnya kecelakaan lalu lintas, tidak dapat dikatakan administrasi. Ia akan tampak sebagai suatu kerja sama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu berbentuk karena pertimbangan rasio.

Menurut Faried Ali (2015:187) manusia memiliki potensi yang secara rasional dapat membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan, pada bentuk kerja sama demikian, kerjasama dapat dikonsepsikan sebagai “administrasi”. Sebagai konsep

keberadaannya masih sekedar ada dalam pemikiran, ia belum tampak sebagai hal yang konkret, dalam bentuknya maupun isinya, dan bagaimana kerjasama itu berlangsung.

Sondang P. Siagian (dalam Syafie 2016:5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

The liang gie (dalam Afifuddin2012:5) mendefenisikan Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Prajudi Atmosudirjo (dalam Afifuddi 2012:5) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial,yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.

- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2.1.2 Teori/Konsep Manajemen

Inu Kencana Syafiie (2010:48) Secara etimologi, management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau menagiere (bahasa Latin) yang berarti melatih.

Menurut George Terry (dalam Inu Kencana Syafiie 2010:49) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia.

Fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga sebagai unsur-unsur menejemen menurut Usman Effendi (dalam Inu Kencana Syafiie 2010:18) ada empat yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya;
2. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk

menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar

3. Kepemimpinan (*Learning or Actuiting*) berfungai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang- orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. Kepemimpinan termasuk di dalamnya oenggerang (*actuiting*) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas- tugasnya.
4. Pengendalian (*Controlling*) merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuan.

2.1.3 Teori/Konsep Prilaku Organisasi

Disisi lain, Waldo (dalam Syafie 2010:52), mengemukakan bahwa “organisasi adalah sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi”.

Sementara menurut Inu Kencana Syafie (2010:52), “Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya terdapat hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar yang setiap anggotanya saling bekerja sama untuk melaksanakan tugas masing-masing”.

Menurut Usman Effendi (dalam Syafiie 2010:130), “Organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama”.

Menurut Hasibuan (2011:120), “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Weber (dalam Silalahi 2011:124), “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya”.

Menurut Waldo (dalam Silalahi 2011:124), "Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi".

Menurut Etzioni (dalam Silalahi 2011:125), "Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalianusaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Silalahi (2011:132) banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas :

1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional.

Perilaku organisasi sangatlah penting dalam suatu kegiatan organisasi karena setiap orang memiliki perilaku yang tidak sama, maka dari itu dalam mempelajari perilaku organisasi menurut Davis(Dalam Kurdi 2011: 25) yaitu:

1. Orang-orang

Membentuk sistem sosial intern organisasi, mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, selain itu ada kelompok yang lebih resmi dan formal.

2. Struktur

Menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi, ada manajer dan pegawai.

3. Teknologi

Menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka dapat menghasilkan banyak hal dengan tangan kosong. Jadi, mereka mendirikan bangunan, merancang, mesin menciptakan proses kerja dan merakit sumber daya.

4. Lingkungan

Semua organisasi beroperasi didalam lingkungan luar, organisasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang banyak memuat unsur lain, seperti pemerintah, keluarga dan organisasi lainnya. Semua unsur ini saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang rumit yang menjadi corak hidup sekelompok orang.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah proses kerja sama yang dilakukan dua orang atau sekelompok yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalakan suatu organisasi.

Perilaku organisasi menurut Cummings (dalam Thoha 2014: 8) adalah suatu cara berfikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan.

Adapun pengertian lain dari perilaku organisasi menurut Duncan (dalam Thoha 2014: 5) perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuannya praktis dari penelaah studi ini adalah untuk mendeterminasikan bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Kelly (dalam Thoha 2014: 9) perlaku organisasi dapat dirumuskan suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya: bagaiman organisasi dimulai, tumbuh, dan berkembang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompk-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, dan instansi-instansi yang lebih besar.

Dari pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku dapat menyimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi.

2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan

Carl J Frederick (dalam Leo Agustino2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan,karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab(2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antarorganisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kuncilembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*)mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeriIndonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakaiuntuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lainseperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy (dalam Suandi 2010: 12) kebijakanharus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinyakebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbanganpertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturanyang ada didalamnya.

James E Anderson (dalam Islamy 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in dealing with aproblem or matter of concern* ” (Serangkaian tindakan

yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose (dalam Budi Winarno 2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah ataupola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.5 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
2. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
3. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya
4. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh
5. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian produktivitas karyawan.
6. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
7. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Adapun fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Cherrington (dalam Irham Fahmi 2014:11) yaitu:

1. Staffing/Employment

Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia.

2. Performance Evaluation.

Departement sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer bertanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan depertement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan.

3. *Compensation*

Dalam hal kompensasi/reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara depertement sumber daya manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan depertement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik.

4. *Training and Development*

Depertemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu para menejer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi awahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru (orientasi) maupun yang sudah ada(pengembangan keterampilan), terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkiraan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektifitas program pelatihan dan pengembangan.

5. *Employe Relations*

Dalam perusahaan yang memiliki sarikat pekerja, depertemen sumber daya manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja.

Mambantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab depertemen sumber daya manusia.

6. *Safety and Health*

Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptkan kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan se secara terus menerus tentang pentingnya keselamata kerja. Suatu program keselamata kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan kerja secara umum.

7. *Personnel Research*

Dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas perusahaan, departemen sumber daya manusia melakukan analisis terhadap tanggung jawab utama departemen sumber daya manusia adalah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sehat (misalnya : mogok kerja, demonstrasi). Dalam perusahaan yang tidak memiliki serikat kerja, departemen sumber daya manusia dibutuhkan untuk terlibat dalam hubungan karyawan. Secara umum, para karyawan tidak bergabung dengan serikat kerja jika gaji mereka cukup memadai dan mereka percaya bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka.

2.1.6 Teori/Konsep Birokrasi

Birokrasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain, birokrasi adakah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

Menurut Max Weber (1864-1920) birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi belaka. Penerapan birokrasi senantiasa dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Fritz Morstein Marx merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Ferrel Heady (2001: 21) dengan mengutip rumusan Thomson menyatakan bahwa: “Organisasi birokratik disusun sebagai suatu hierarki otorita yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian kerja, dan juga telah amat terperinci.”

Peter A. Blau dan Charles H. Page (2009: 13) memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematik dari pekerjaan banyak orang.

Dennis Wrong mencatat bahwa birokrasi organisasi yang diangkat sepenuhnya untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai aneka tujuan; ia

diorganisasi secara hierarkis dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah; mencipta pembagian pekerjaan jelas yang menugasi setiap orang dengan tugas yang spesifik; peraturan-peraturan umum dan ketentuan-ketentuan yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan; karyawan dipilih terutama berdasarkan kompetensi dan keterlatihannya; kerja dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan sepanjang hidup.

Cacat-cacat birokrasi, yang terungkap dalam istilah “pita merah” (*red tape*) dan Hukum Parkinson, tidaklah tepat untuk dilekatkan dengan analisis Weber, karena: “pertama, birokrasi memang seringkali tidak efisien, lamban, dan kaku; kedua, kebanyakan aktivitas birokrasi tidak cocok dengan kondisi modern, sebab aktivitas ini dilaksanakan sedemikian buruknya oleh organisasi-organisasi birokratik. Kebanyakan ahli ilmu sosial mendefinisikan birokrasi dalam satu arah yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi fenomena yang terlilit dalam organisasi yang benar dan kompleks.

Ferrel Heady (2001:15) menunjukkan adanya tiga macam pendekatan dalam merumuskan birokrasi:

1. Pendekatan struktural
2. Pendekatan *behavioral* (perilaku)
3. Pendekatan pencapaian tujuan

2.1.6.1 Tipe Ideal Birokrasi

1. Otorita Tradisional

Otorita tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan sebagaimana diberlakukan di masa lampau dan yang kini masih

berlaku. Legitimasi dikaitkan dengan kewajiban penduduk untuk menuangkan loyalitas pribadinya kepada siapa yang menjadi kepalanya. Perubahan tidak diperkenankan oleh preseden.

2. Otorita Kharismatik

Otorita ini timbul karena penghambaan seseorang kepada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa, misalnya mempunyai sikap heroik, dan sifat-sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Kedudukan seorang pemimpin kharismatik tidaklah diancam oleh kriteria-kriteria dan aturan-aturan tradisional. Otorita kharismatik merupakan lawan keteraturan rutin.

3. Otorita Legal-Rasional

Otorita ini didasarkan pada aturan yang bersifat tidak pribadi impersonal yang ditetapkan secara legal. Otorita legal-rasional didasarkan pada aturan-aturan yang pasti. Aturan yang secara rasional telah dikembangkan oleh masyarakat. Intisari dari otorita legal-rasional adalah birokrasi. Jantung dari birokrasi adalah sistem hubungan otorita yang dirumuskan secara rasional oleh aturan-aturan.

Weber menetapkan enam prinsip bagi sistem-sistem birokrasi modern, yang berasal dari gagasan kewenangan rasional/legal (Gerth dan Mills):

1. Prinsip bidang-bidang yuridiksi umumnya ditata dengan hukum atau peraturan-peraturan administratif.

2. Prinsip hierarki jabatan dan suatu sistem super-ordinasi dan subordinasi yaitu ada suatu pengawasan jabatan-jabatan yang lebih rendah oleh jabatan-jabatan yang lebih tinggi.
3. Manajemen kantor modern didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disimpan. Umumnya birokrasi memisahkan aktivitas pejabat sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkungan pribadi. Uang-uang dan perlengkapan negara dipisahkan dari kepemilikan pribadi.
4. Manajemen kantor, setidaknya semua manajemen kantor yang dispesialisasikan dan manajemen yang demikian secara jelas modern biasanya mensyaratkan pelatihan ahli dan menyeluruh.
5. Pada awalnya dalam semua hal keadaan normal dibalik, bisnis pejabat diturunkan sebagai aktivitas sekunder.
6. Manajemen kantor mengikuti aturan-aturan umum, yang lebih atau kurang stabil, lebih atau kurang melelahkan, dan yang bisa dipelajari.

Kemiripan prinsip-prinsip menurut Chandler dan Plano juga dapat ditentukan dalam hal-hal berikut:

1. Otorita untuk pemerintah.
2. Prinsip-prinsip dan hierarki perkantoran dan jenjang tingkatan otorita yang terbangun dalam sistem superior dan subordinasi.

3. Birokrasi rasional harusnya terdiri atas orang-orang yang bekerja paruh waktu, digaji, dan diangkat secara karier melalui latihan keahlian, dipilih berdasarkan kualifikasi teknis.
4. Mengurusi perbedaan manusiawi.

Chandler dan Plano menunjukkan bahwa kelemahan teori Weber adalah tidak mengakui adanya konflik antara otorita yang telah dibangun secara hierarkis itu, serta tidak mudahnya menghubungkan proses birokrasi dan modernisasi di kalangan negara-negara berkembang.

2.1.7 Teori/Konsep Good Governance

Good Governance Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumberdaya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut OECD dan WorldBank (Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendektaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan nonnegara dalam satu usaha kolektif.

Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

2.1.7.1.Prinsip-PrinsipGood Governance

Kunci utama untuk memahami kepemerintahan yang baik (good governance) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen good governance tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perludibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan prundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta

dipatuhi secara utuh (impartial), terutama tentang atuanhukum dan hak azasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagaiproses, kelembagaan dan informasi harus dapat di aksessecara bebas oleh merekayang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudahdimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi

2.1.8 Teori/Konsep Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PajakDaerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “PajakDaerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat

Menurut Siahaan (2013:9) mengumumkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah.

2.1.8.1 Fungsi Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:17), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Fungsi pajak daerah tidak jauh beda dengan fungsi pajak pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya dalam segala bidang.

2.1.8.2 Jenis Pajak Daerah

- d) Pajak Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

6. Pajak Kendaraan Bermotor
7. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 9. Pajak Air Permukaan
 10. Pajak Rokok
- e) Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

12. Pajak Hotel
13. Pajak Restoran
14. Pajak Hiburan
15. Pajak Reklame
16. Pajak Penerangan Jalan
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
18. Pajak Parkiran
19. Pajak Air Tanah
20. Pajak Sarang Burung Walet
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- f) Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
3. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

2.1.9 Teori/Konsep Retribusi Daerah

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara

bagi penduduknya secara perorangan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan social ekonomi dapat dijadikan sebagai obyek retribusi.

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah:

- a.) Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum
- b.) Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar
- c.) Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- d.) Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas

kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2.1.9.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

1. Objek Retribusi Daerah :

- a). Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b). Jasa Usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c). Perizinan Tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2. Subjek Retribusi Daerah

- a). Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b). Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c). Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.9.3 Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Umum
 - b. Retribusi pelayanan prsampaahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. REtribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j. Retribusi Penyebrangan di Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.10 Teori/Konsep Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir.

Menurut Sunarto dalam (Caroline 2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter* atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

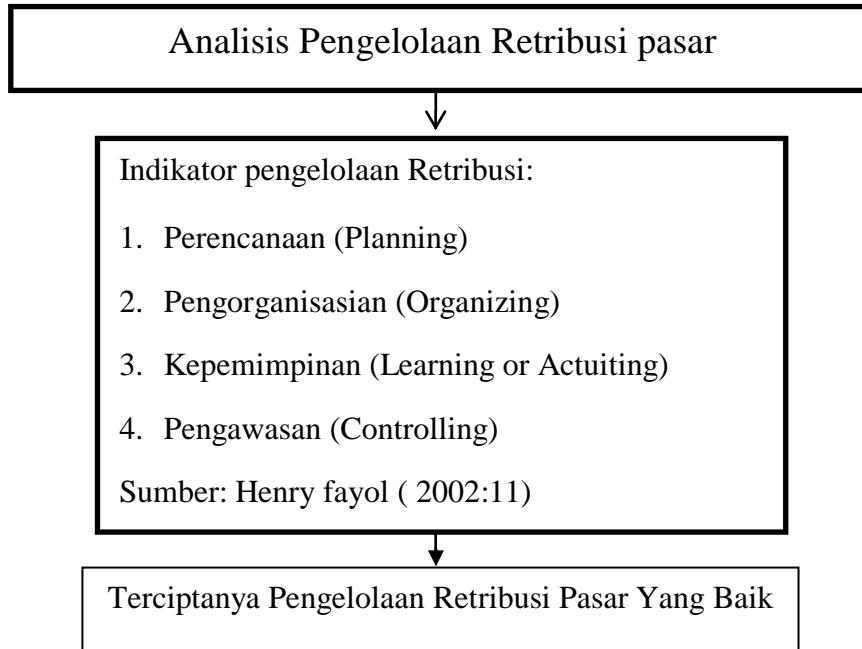
Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m,
2. Obyek retribusi adalah pemakainan tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah,
3. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,
4. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan,
5. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi,
6. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta di terapkan sistem denda.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar: 2.1 Kerangkapemikiran



2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh kerena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relefan, belum didasarkan pada fakta- fakta empiris melalui pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: diduga sementara bahwa Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar diPasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum Terkelolah dengan baik.

2.4 Konsep Operational

- 2.4.1 Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. (Henry fayol 2002:11)
- 2.4.2 Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. (Henry fayol 2002:11)
- 2.4.3 Kepemimpinan (*Learning or Actuiting*) berfungai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang- orang lain melakukan tugas- tugas yang esensial. Kepemimpinan termasuk di dalamnya oenggerang (*actuiting*) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas- tugasnya. (Henry fayol 2002:11)
- 2.4.4 Pengawasan (*Controling*) merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan

kinerja yang sudah ditetapkan . Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan. (Henry fayol 2002:11)

2.5 Operational Variabel

Tabel 2.1 Operational Veriabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Retribusi Pasar	Pengelolaan	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Menurut Bapak/Ibu apa rencana pemerintah untuk mengolah retribusi pasar kedepannya? 2. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah sudah mengolah dana retribusi dengan baik?	Ordinal
		2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana struktur pengorganisasian pasar di pasar benai? 2. Menurut Bapak/Ibu pengelolah retribusi pasar sudah bekerja secara efektif untuk mengolah retribusi pasar?	Ordinal
		3. Kepemimpinan (<i>Learning or Actuiting</i>)	1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana cara pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk menjaga kondisi pasar? 2. Menurut Bapak/ibu apakah pemerintah sudah mengimplementasik	Ordinal

			an dana retribusi dengan baik ?	
	4. Pengawasan(<i>Controlling</i>)		<p>1. Menurut Bapak/Ibu Apa yang dilakukan pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan masyarakat untuk tetap membayar retribusi pasar?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu apa yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan retribusi pasar?</p>	Ordinal

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Benai dan Objek penelitiannya adalah Pengelolah Retribusi pasar di Pasar Benai yang menjadi pemanfaat pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.

3.2 Informan

Menurut Hendarsono (dalam Suyanto 2015:171) informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Menentukan informan yang ada, digunakan teknik. Yaitu teknik “*Purposive Sampling*” . *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan informan secara subjektif dengan maksud, tujuan dan pertimbangan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang dijadikan sampel tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan atau diperlukan dalam penelitian nantinya.

Tabel: III.1:Tabel Informan Penelitian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Camat Benai	1	5%
2	Lurah	1	5%
3	Pengelolah Retribusi Pasar	8	40%
4	Masyarakat/Pedagang	10	50%
Jumlah		20	100%

Sumber Data Olahan 2020

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penilitian menggunakan sumber data, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:82) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang memerlukannya.. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data- data terkait tentang Bagaimana Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Benai yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:82) data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang dapat diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, atau literatur lain yang berguna bagi penelitian ini.. Data sekunder juga disebut data tersedia.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkkan jalannya suatu penelitian. Adapun batasan peneliti yang menjadi fokus pada peneliti ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka berpikir penelitian, yaitu dengan menjelaskan Bagaimana Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan beberapa Indikator.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peneliti memilih lokasi di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi karena lokasi tersebut memiliki Retribusi Pasar yang bergerak aktif dalam peningkatan PAD dan mengatasi perekonomian masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data (perwawancara) dengan sumber data (responden).

Menurut (Ahmadi 2014:119) Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penilitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat

dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi .

3.6.2 Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2009:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses- proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan apabila responden tidak terlalu besar.

Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan Retribusi Pasar untuk kebutuhan masyarakat Desa di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi..

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007:240) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya momumental dari seseorang. Sedangkan menurut G.J Renier (dalam Sugiyono 2007:240) menjelaskan istilah dokumentasi dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas yaitu yang meliputi semua sumber, baik tertulis maupun lisan; kedua dalam arti sempit yaitu meliputi semua sumber data tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat- surat konsensi, hibah dan sebagainya. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data tentang retribusi Pasar, dan lain sebagainya.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2012:330) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2014:91), Kegiatan analisis terdiri tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.7.1 Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

3.7.2 Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberkemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.3 Menarik kesimpulan verifikasi.

Merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, makna- makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan dalam fokus penelitian ini.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Rencana Kegiatan Penelitian tentang Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

N o	Rancangan Kegiatan	2019/2020										
		Apr		Mei		Juni		Juli		Ags		Sep
1	Rencana Pembuatan Proposal	x	x									
2	Pengajuan Judul Proposal			x	x							
3	Bimbingan dan Konsultasi Propasal				x	x	x					
4	Seminar Proposal					x						
5	Revisi Proposal						x	x				
6	Bimbingan Skripsi									x	x	x
7	Seminar Skripsi											x
8	Perbaikan dan Revisi Skripsi											x

Sumber Data Olahan 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografi

Kecamatan Benai adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada didalam Kabupaten Kuantan Singgingi dengan luas wilayah 113,83 Km² yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuantan Tengah
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sentajo Raya
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sentajo Raya
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pangean

Tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan benai dari permukaan laut adalah 25 s/d 30 meter, yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Benai Kecil, yang kurang lebih jaraknya 10 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgingi, yang dapat ditempuh melalui darat. Wilayah kecamatan Benai terdiri dari daratan hingga bergelombang, elevasi 2-3⁰, berada pada zona geseran, patahan dengan arah belum diketahui. Potensi terhadap banjir disekitar daerah aliran sungai (DAS), erosi dan longsor berpotensi terjadi pada bagian tengah. Aliran permukaan berupa beberapa sungai dan rawa bagian tenggara. Aliran permukaan lain berupa aliran lain berupa aliran air tanah dalam diperkirakan cadangannya sebesar 15 juta m³ pertahun (cekungan Teluk Kuantan bagian Utara). Daerah ini mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan

karet, dan juga terkenal objek wisata Danau Rawang Udang yang terletak DI Desa Talontam Benai.

Tabel 4.1:Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Benai	20,50
2	Benai Kecil	5,95
3	Koto Benai	3,75
4	Talontam Benai	9,50
5	Banjar Benai	27,90
6	Gunung Kesiangan	3,37
7	Tebing Tinggi	4,50
8	Koto Simandolak	4,12
9	Pulau Ingu	3,65
10	Pulau Bungin	4,56
11	Pulau Tengah	2,87
12	Ujung Tanjung	3,56
13	Banjar Lopak	4,12
14	Pulau Kalimanting	4,78
15	Tanjung Simandolak	6,14
16	Pulau Lancang	4,56
Jumlah		113,83

Sumber Data : Kantor Camat Benai 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa desa Banjar Benai adalah desa yang paling luas wilayahnya dengan luas wilayah 27,90 km², dan yang paling kecil luas wilayah desanya di Kecamatan Benai adalah Desa Pulau Tengah dengan luas wilayah 2,87 Km².

4.2 Keadaan Penduduk

Penduduk asli daerah Kuantan Singingi adalah suku melayu sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku melayu didaerah ini juga memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah

asalnya ke daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan di ikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Kecamatan Benai disamping suku melayu (asli) adalah suku jawa dan suku minang.

Masyarakat Kecamatan Benai pada umumnya tinggal di perkampungan sepanjang Batang sungai Kuantan, pilihan ini dilakukan atas kepentingan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sungai Kuantan selain sarana transportasi juga sebagai tempat berbagai aktivitas lain seperti mandi, mencuci, dan sebagainya. Setiap Pemukiman akan dijumpai berbagai tanaman di sekelilingnya yang dinamakan pelak. Jumlah penduduk Kecamatan Benai berdasarkan hasil laporan jumlah penduduk Kecamatan Benai yang dilaksanakan pada bulan mei 2013 sebanyak 19.925 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 10.048 jiwa dan perempuan 9.877 jiwa. Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Benai

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	584	2,94%
2	ABRI/POLRI	52	0,26%
3	Swasta	2.382	11,95%
4	Buruh	2.187	10,98%
5	Petani	8.853	44,43%
6	Tidak Bekerja	5.867	29,44%
Jumlah		19.925	100%

Sumber Kantor Camat Benai 2020

4.3 Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik. Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 4.3: Sarana Pendidikan Kecamatan Benai

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	26
2	SLTP	5
3	SLTA	3
4	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		34

Sumber UPTD Kecamatan Benai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan umum seperti SD 26, SMP 4, SMA 2. Sedangkan untuk pendidikan agama adalah MTs 1 dan MA 1.

4.4 Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. Permasalahan

lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air, pembuangan kotoran keluarga (jamban), pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kuantan singgingi, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Status kesehatan penduduk dapat diukur dengan menggunakan angka kesakitan (*morbidity rate*) yaitu keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta meningkatnya tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu hamil dan sangat terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita tetap disosialisasikan karena merupakan alternatif yang paling baik.

4.5 Agama

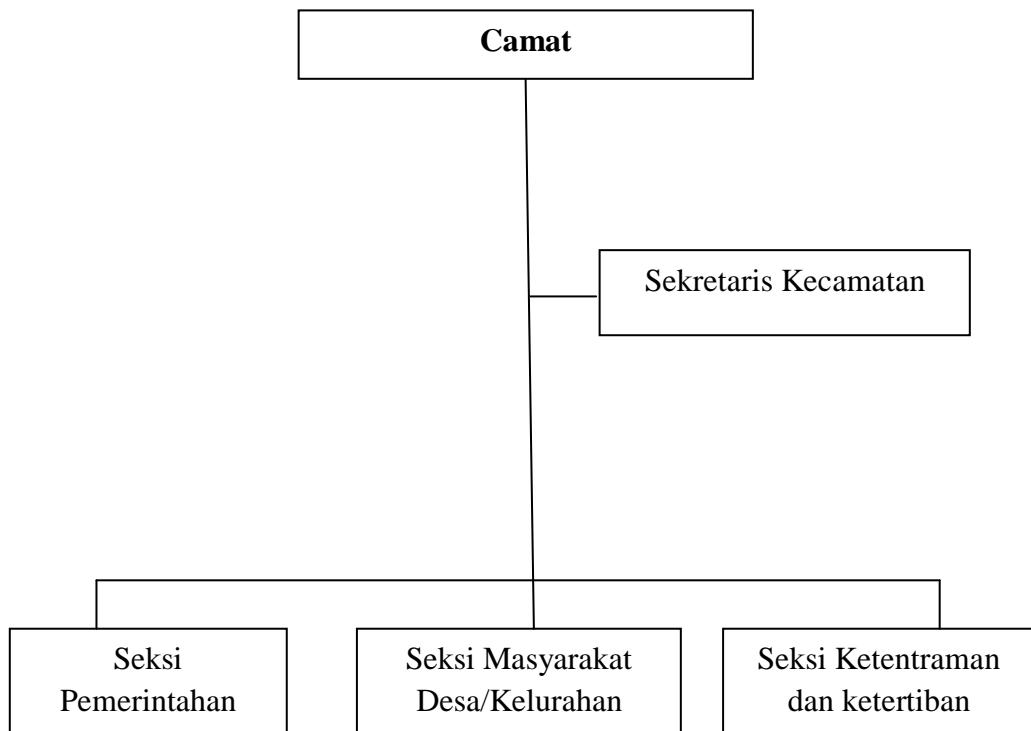
Pembinaan Sumber Daya Manusia indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang berkesinambungan, antara intensitas spiritual dan intensitas intelektual. Dengan kata lain, bangsa indonesia haruslah sebagai individu yang beriman, berilmu, dan berketerampilan teknologi yang tinggi. Secara demografis, masyarakat Kecamatan Benai adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa cultural religius islami. Islam adalah agama mayoritas kecamatan Benai, tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya, heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam.

4.6 Pemerintahan Kecamatan Benai

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan masyarakat dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan lain sebagainya. Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singgingi yang terdiri dari 14 desa adalah sebagai lembaga sosial milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan nasional tersebut adalah sesuai dengan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah dara manusia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut SP. Siagian, suatu organisasi yang bagus bukanlah menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam suatu jabatan. Untuk melihat struktur organisasi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari struktur berikut:

Gambar 4.1:Struktur Organisasi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber Kantor Camat Benai

Pemerintah Kecamatan Benai di pimpin oleh seorang camat yang merupakan seorang pemimpin pemerintahan yang bernaung pada suatu lembaga organisasi yang berkedudukan diwilayah kecamatan dengan membawahi beberapa desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan camat Benai dibantu oleh

Sekretaris Camat, 3 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kasi Trantib).

4.6.1 Camat

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b) Pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pembinaan kelurahan;
- e) Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
- f) Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- g) Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / badan; dan
- h) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Perencanaan.
3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan

a) Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

h) Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
 - b) Penyelenggaraan tugas pemerintahanumum dan pembinaan keagrariaan;
 - c) Pembinaan politik dalam negeri;
 - d) Pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - f) Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
 - g) Pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - h) Pembinaan pendidikan dan kesehatan;
 - i) Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - j) Pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusun Perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian. Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Penyelanggaraan pengelolahan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- b) Penyelanggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan Masyarakat;
- c) Penyelanggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakan;
- d) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan unit kerja; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan, membawahi:

- a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b) Sub Bagian Perencanaan;

Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

A. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan investarisasi prasarana dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang urusan umum dan keuangan;

- b) Melaksanakan urusan kesekretariatan;
- c) Menyimpan, Mengatur dan Memelihara arsip dinas;
- d) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e) Menyusun perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- f) Memelihara gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- g) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas;
- h) Melakukan Pengadaan perlengkapan;
- i) Menyimpan, Menerima dan mendistribusikan perlengkapan;
- j) Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- k) Mengurus administrasi peralatan, perlengkapan serta mengurus administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara;
- l) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- m) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- n) Mengelola sistem informasi manajemen perlengkapan;
- o) Mengelola administrasi kepegawaian dan Mengelola data kepegawaian;
- p) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan administrasi Keuangan, Menyusun Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- q) Mengelola pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- r) Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;

- s) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
- t) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
- u) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- v) Menyusun laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan;
- w) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- x) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja diwilayah kecamatan;
- b) Pengumpulan, pengelolahan dan penganalisan data potensi kecamatan;
- c) Penyusun Rencana Strategis Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;

- d) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e) Pengelolaan data statistik dan informasi diwilayah kecamatan;
 - f) Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah kecamatan;
 - g) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
 - h) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan kecamatan;
 - i) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan;
 - j) Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan;
 - k) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
 - l) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; dan
- d) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Rincian tugas Seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi pemerintahan;
- b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- c) Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa;
- d) Memfasilitasi penyelenggarakan kejasama dan penyelesaian perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah kerjanya;
- e) Memfasilitasi penataan desa /kelurahan;
- f) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- i) Melaksakan pengawasan dan pendaftaran atas tanah –tanah Negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j) Melaksakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k) Melaksakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa , serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
 - l) Melaksakan tugas pembantuan pelaksaan monitoring dan investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara di wilayah kerjanya;
 - m) Membina dan mendistribusikan pelaksaan tugas kepada bawahan;
 - n) Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan;
 - o) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangi sebagian urusan otomi daerah sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyai fungsi:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- f) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

Rincian tugas seksi pemberdayaan masyarakat pekon adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- b) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pembangunan desa/kelurahan dan penguatan

kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga lainnya (atau nama lain);

- c) Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum;
- d) Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
- e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau UPT, instansi vertikal dan swasta;
- g) Mengoordinasikan penyusunan RPJM desa atau kelurahan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan

pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;

- j) Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangi sebagian urusan otonomi sesuai dengan bidangnya; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan;
- 2) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;

- 3) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di kecamatan;
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan kepada camat;

Rincian tugas seksi kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan data dan program Pemerintah Kecamatan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar melaksanakan tugas dapat dilaksanakan dengan tuntas;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- e. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial
- f. Menyelenggarakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, olah raga kebudayaan, periwisata dan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan perempuan;
- g. Mengevaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan;

- h. Membuat laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi ketenteraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas seksi ketenteraman dan ketenteraman dan ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertibaan masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- g. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembedaran dan ketertiban masyarakat; dan

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Informan Penelitian

Jumlah informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini, yang terdiri dari Camat Benai, Lurah, Pengelolah Retribusi Pasar, dan Masyarakat/Pedagang.,

5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan yang penulis gunakan terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Karakteristik Informan di Lihat dari Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki- laki	12	60 %
2	Perempuan	8	40 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan untuk Penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak didominasi oleh laki- laki yaitu sebanyak 12 orang dengan Persentase 60 % sedangkan perempuan hanya sebanyak 8 orang dengan Persentase 40%.

5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa saja yang tidak dan harus dilakukan. Disamping itu

tidak dipungkiri juga bahwa usia juga mempengaruhi fisik seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tua usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan usianya yang lebih muda.

Berikut ini akan dikelompokkan jumlah responden berdasarkan umur yang telah peneliti kelompokkan dalam 3 kategori yaitu umur 20-30 Tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 51- 60 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 2 Karakteristik Informan menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Percentase
1	20-30	2	10%
2	31-40	7	35 %
3	41-50	8	40%
4	51-60	3	15 %
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berkisar antara umur 20-30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 10%, umur 31-40 tahun berjumlah Tujuh orang dengan persentase 35%, umur 41- 50 tahun berjumlah Delapan orang dengan persentase 45% dan umur 51- 60 tahun berjumlah tiga orang dengan persentase 15%.

5.1.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan serta merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan akan membuat matang pola pikirnya dalam berbuat dan bertingkah laku serta dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tingkat pendidikan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Karakteristik Informan menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0 %
2	SMP Sederajat	5	25 %
3	SMA Sederajat	7	35 %
4	Diploma	0	0 %
5	Sarjana	8	40 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari tamat SMP berjumlah Lima orang dengan persentase 25%, Tamat SMA berjumlah tujuh orang dengan persentase 35%, dan Sarjana berjumlah delapan orang dengan persentase 40%.

5.1.4 Informan Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai status pekerjaan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4: Karakteristik Informan menurut status pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Camat Benai	1	5%
2	Lurah	1	5%
3	PNS	3	15%
4	Wiraswasta	5	25%
5	Pedagang	10	50%
Jumlah		20	100%

Sumber Data olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa status pekerjaan informan yang penulis gunakan terdiri dari Camat Benai berjumlah Satu orang dengan

persentase 5%, Lurah berjumlah Satu orang dengan persentase 5 %, PNS berjumlah 3 orang dengan persentase 15%, Wiraswasta berjumlah Lima orang dengan persentase 25%, dan Pedagang berjumlah sepuluh orang dengan persentase 50%.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan indikator tentang manajemen pelaksanaan retribusi pasar maka penulis menggunakan empat variabel untuk mengetahui hasil analisis pengelolaan retribusi pasar di pasar Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Empat variabel tersebut adalah Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Kepemimpinan (Learning or Actuiting) dan Pengendalian (Controlling), dimana peneliti menjadikan indikator ini sebagai Kerangka Pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar, maka dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dari penjelasan hasil penelitian tiap- tiap Indikator dibawah ini.

5.2.1 Indikator Perencanaan (Planning)

Perencanaan (Planning) merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Pada Indikator ini diambilah item penelitian sebanyak dua item yang dijadikan landasan pertanyaan **pertama**

Berikut hasil wawancara dengan Camat Benai yang mengatakan bahwa:

Untuk kedepan kami akan lebih baik dalam mengolah retribusi pasar dan memberikan trobosan terbaru untuk membuat kondisi pasar lebih baik dan

kondusif. Kami juga akan membangun lebih banyak kios-kios tempat berjualan pedagang dan membuat infrastruktur lainnya yang akan memudahkan pedagang dan pembeli dalam bertransaksi

(Wawancara,25 Agustus 2020)

Tanggapan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh informan lainnya yaitu Lurah Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah pasti akan mengolah retribusi pasar dengan baik untuk membuat pasar benai jadi lebih baik.Sejauh ini menurut saya pemerintah sudah mengolah retribusi dengan baik

(Wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan Camat Benai dan Lurah Benai diatas kesimpulan yang saya ambil yaitu Menurut mereka Pengolahan retribusi pasar sudah mereka lakukan dengan baik dan juga akan melakukan trobosan terbaru dalam membangun Infrastruktur pasar benai untuk membuat pasar menjadi lebih nyaman dan kondusif.

Kemudian berikut hasil wawancara dengan Jawaban yang hampir sama dari pedagang di pasar benai yaitu ibu Suriyanti, bapak junaidi, bapak jajang, ibu ranti dan bapak samsul basri yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah memang harus merencanakan pembangunan di pasar benai karna sejauh ini kondisi pasar belum terlalu nyaman menurut saya. Masih banyak tempat berjualan yang kurang nyaman dan saya berharap pemerintah lebih serius dalam mengolah retribusi pasar

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Selanjutnya hasil wawancara dengan pedagang di pasar benai yang mengatakan jawaban yang hampir sama yaitu bapak Nardianto, bapak Sumardi, ibu Rosmili, bapak Agus Salim dan Ibu Deniati yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah harus mempergunakan hasil dana retribusi sebagaimana mestinya karena selama ini menurut saya masih belum terkelolah dengan karena pedagang belum merasakan hasil sepenuhnya

(Wawancara,26 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan pedagang/masyarakat diatas kesimpulannya menurut mereka pemerintah memang harus merencanakan pengelolaan retribusi dengan baik supaya pasar menjadi lebih nyaman. Karena sejauh ini pemerintah belum mempergunakan dana retribusi dengan baik.

Selanjutnya menurut informan yang berasal dari pengelolah retribusi pasar 1, 2 dan 4 dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah pasti akan merencanakan hal baru untuk membangun pasar benai. Dan kami juga berusaha untuk lebih cepat mengolah retribusi pasar

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Tanggapan yang hampir sama juga di kemukakan oleh pengelolah retribusi pasar 3,5,dan 6 lainnya yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kami akan sudah melakukan pengelolaan retribusi dengan baik. Memang mungkin belum sepenuhnya terlaksna karna adanya berbagai hal yang menghambat pelaknaanya

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara dengan pengelolah retribusi pasar diatas kesimpulan yang saya ambil adalah mereka berpendapat bahwa pemerintah pasti akan merencanakan pengelolaan retribusi yang terbaik dan menurut mereka pengelolaan retribusi pasar sudah dilaksanakan tapi belum maksimal karna ada berbagai hal dan hambatan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan camat Benai, lurah, pengelolah retribusi pasar dan pedagang/masyarakat diatas yang peneliti jadikan informan memberikan tanggapan atau intisari dari jawaban yang hampir sama satu sama lain yaitu mengatakan bahwa Pemerintah pasti akan mempergunakan retribusi pasar dengan baik, dan akan merencanakan pembangunan untuk pasar benai untuk

kedepannya, walaupun sejauh ini pemerintah belum sepenuhnya dapat mengolah retribusi tersebut dengan baik karna berbagai hal atau hambatan .

Kemudian untuk item penilaian **kedua** dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah sudah mengolah dana retribusi dengan baik?”

Berikut hasil wawancara dengan pedagang pasar Benai dengan jawaban yang hampir sama yaitu bapak Samsul basri, bapak Nardianto, ibu Rosmili dan Bapak Agus Salim mengatakan bahwa:

Menurut saya belum karena seperti yang terlihat pedagang belum merasakan hasil dari retribusi tersebut. Saya berharap pemerintah harus lebih serius dalam mengolah retribusi pasar
 (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari pedagang dari pasar benai dengan jawaban yang hampir sama yaitu ibu Deniati , Bapak Junaidi dan Bapak Sumardi mengatakan bahwa:

Menurut saya belum karena sepertinya dana retribusi tidak direalisasikan sepenuhnya oleh para pengelolah retribusi pasar, sehingga fasilitas di pasar benai belum memadai dan membuat para pedagang tidak puas
 (Wawancara, 26 Februari 2019)

Dari wawancara dengan masyarakat diatas menurut mereka dana retribusi belum terealisasi atau belum terkelolah dengan baik karna menurut mereka terdapat adanya penggelapan dana retribusi oleh para pengelolah retribusi pasar yang menyebabkan fasilitas di pasar benai belum memadai yang membuat pedagang tidak nyaman.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan dari pengelolah retribusi pasar 4 dan 5 yang mengatakan jawaban yang hampir sama yaitu:

Saya sebagai pengelolah retribusi pasar sudah berusaha untuk mempergunakan dana retribusi pasar sebagaimana mestinya. Dan saya rasa kami sudah mengelolah retribusi pasar Benai dengan baik
 (Wawancara, 27 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan yang juga berasal dari pengelolah retribusi pasar 2, 3 dan 6 yang mengatakan bahwa:

Kami sudah berusaha mengelolah retribusi pasar dengan baik tapi memang mungkin belum maksimal pelaksanaannya, untuk kedepannya kami pasti akan mengelolah retribusi dengan maksimal supaya retribusi terkelola dengan baik dan kondisi pasar menjadi nyaman dan pedagang menjadi puas.
 (Wawancara, 27 Agustus 2020)

Menurut wawancara saya dengan pengelolah retribusi pasar diatas dapat diambil kesimpulannya menurut mereka sudah berusaha mengelolah retribusi pasar dengan baik tapi memang belum maksimal pelaksanaannya, tetapi menurut mereka untuk kedepannya pasti dittingkatkan pengelolaanya.

Selanjutnya Tanggapan dari informan yang berasal dari Perdagang di pasar benai yaitu bapak jajang, yang mengatakan bahwa:

Menurut yang saya lihat belum efektif pelaksanaan pengelolaan dana retribusi tersebut dari yang terlihat masih lambannya tanggapan para pengelolah pasar jika ada keluhan dari pedagang dan tidak efektifnya pembersihan sampah di pasar ini.
 (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari pedagang di pasar benai yaitu ibu Suryanti dan Ibu Ranti yang mengatakan bahwa:

Kalau yang saya lihat mereka belum mengelolah dana retribusi pasar dengan baik padahal kami para pedagang sudah rutin membayar retribusi pasar tersebut.
 (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Menurut wawancara peneliti dengan pedagang pasar benai diatas menurutnya memang pengelolaan retribusi pasar belum efektif padahal para

pedagang sudah rutin membayar retribusi tersebut tetapi mereka belum merasakan hasil dari retribusi tersebut, para pedagang juga berharap pemerintah dan para pengelolah retribusi pasar dapat mengelolah retribusi pasar dengan efektif.

Kesimpulan dari Indikator Perencanaan (Planning) melalui wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah pemerintah memang harus merencanakan pengelolaan retribusi pasar dengan serius, sejauh ini memang pengelolaan retribusi pasar belum tercipta dengan baik karna masih adanya keterlambatan dari pengelolah retribusi pasar dalam menanganinya. Sehingga fasilitas di pasar benai belum memadai dan menyebabkan para pedagang kurang nyaman. Padahal para pedagang sudah membayar ongkos retribusi dengan rutin tetapi mereka merasa tidak ada feedback dari pembayaran tersebut .

Analisis peneliti dari Indikator pertama yaitu pemerintah memang harus lebih serius dalam mengelolah retribusi pasar bukan hanya rencana tapi juga harus cepat tanggap dalam hal ini, sehingga pedagang bisa lebih tenang dan tidak merasa dibohongi atas pembayaran retribusi tersebut.

5.2.2 Indikator Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (Organizing) merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.Pada tipe ini diambilah item penilaian sebanyak dua item yang dijadikan landasan

pertanyaan pada wawancara terhadap masing- masing informan, dengan pertanyaan yang **pertama**.

Berikut hasil wawancara dengan Camat Benai yang mengatakan bahwa:

Struktur pengorganisasian pasar benai ada dan dijalan kan dengan sebagaimana mestinya. Dan para pengelolah retribusi pasar sudah menjalankan perannya menurut kami namun mungkin pelaksanaan pembangunan pasar yang masih lamban.

(Wawancara 25 Agustus 2020)

Selanjutnya informan dari lurah Benai yang mengatakan bahwa:

Saya kurang mengetahui struktur pengorganisasian di pasar benai ini karena yang saya tahu Cuma ada pengelolah pasar. Dan saya rasa pengelolah pasar tersebut menjalankan perannya tapi mungkin belum maksimal sehingga banyak pedagang yang tidak terima.

(Wawancara, 25 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan Camat Benai dan Lurah Benai diatas menurut mereka Struktur pengorganisasian pasar di pasar benai berjalan dengan baik-baik saja dan para pengelolah pasar juga bekerja sebagaimana mestinya dan mungkin memang pelaksanaannya masih lamban.

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari pedagang di pasar Benai dengan jawaban yang hampir sama yaitu Bapak Junaidi, Bapak Jajang, Ibu Deniati dan Ibu Ranti yang mengatakan bahwa:

Menurut saya struktur pengorganisasian dipasar benai belum terkontrol dengan baik dan mereka belum mampu mengendalikan dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga belum terciptanya pengelolaan retribusi pasar dengan baik.

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan yang berasal pedagang pasar benai dengan jawaban yang hampir sama yaitu bapak Agus Salim, Ibu Suri yanti dan Bapak Nardianto yang mengatakan bahwa:

Saya kurang tahu bagaimana struktur pengorganisasian di pasar benai ini, karena saya tidak pernah mendengarnya, kalaupun ada saya berharap mereka menjalankan tugasnya dengan baik.

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan pedagang diatas tanggapan yang mereka berikan yaitu beberapa dari mereka kurang mengtahui bagaimana struktur pengorganisasian di pasar benai ini, tetapi terlepas dari itu semua para pedagang berharap yang terlibat pengelolaan retribusi pasar ini bisa bekerja dengan serius dan efektif.

Selanjutnya informan dari pengelolah retribusi pasar benai 1,4,dan 6 yang mengatakan bahwa:

Menurut saya struktur pengorganisasian pasar sudah ada dan berjalan dengan dengan bagaimana semestinya. Pengelolah retribusi pasar bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Informan dari pengelolah retribusi pasar lainnya yang mengatakan bahwa :

Sebenarnya struktur pengorganisasian pasar itu dijalankan oleh para pengelolah retribusi pasar tapi memang beberapa dari pengellah pasar belum maksimal kinerjanya ,

(Wawancara, 27 Agustus 20120)

Dari wawancara peneliti dengan para pengelola retribusi pasar diatas mereka mengatakan struktur pengorganisasian dipasar benai sudah berjalan dengan baik. Tetapi mungkin pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar yang belum tercipta dengan baik atau belum terkelola dengan baik.

Peneliti melihat jawaban yang diberikan masing- masing informan 1 sampai 20 terdiri dari pedagang, camat Benai, dan pengelolah retribusi pasar jawabannya berbeda-beda yaitu menurut pedagang struktur pengorganisasian di pasar benai belum baik masih perlu ditingkatkan kinerjanya, sedangkan menurut Camat benai

dan pengelolah retribusi pasar sendiri struktur pengorganisasian sudah berjalan dengan baik tetapi memang belum maksimal pelaksanaannya. Maka dari itu peneliti melaksanakan Observasi, dan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa memang Struktur pengorganisasian pasar benai benar belum terlaksana dengan baik.

Kemudian untuk penilaian item **kedua** untuk wawancara dengan semua informan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan yang berasal dari pedagang pasar Benai yaitu bapak Samsul Basri, Ibu Ranti, bapak Nardianto dan ibu Rosmili yang mengatakan bahwa:

Menurut saya mereka belum bekerja secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih belum tercapainya standar pengelolaan pasar yang baik. Mereka belum bisa melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu dan tidak cepat tanggap.
(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari pedagang pasar benai yang lain dengan jawaban yang hampir sama yaitu Ibu Deniati, Bapak Jajang, dan Bapak Sumardi yang mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya sangat belum bekerja secara efektif karena mereka belum menggunakan semua dana retribusi dengan efisien terbukti dengan belum adanya pembangunan di pasar ini. Belum ada pembangunan yang berarti. Saya rasa banyak dari pengelolah pasar yang menggelapkan dana retribusi pasar.
(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan pedagang diatas menurut mereka para pengelolah pasar tidak menggunakan dana dari retribusi pasar dengan efektif, dan mereka menduga adanya penggelapan dana dari retribusi pasar, hal ini terbukti dengan tidak adanya pembangunan di pasar Benai yang berjalan dengan baik. Dan

para pengelolah pasar tidak mengerjakan tugasnya dengan efektif mereka kurang peduli dengan pengeelolaan retribusi pasar.

Selanjutnya menurut Informan yang berasal pengelola retribusi pasar 1,3,dan4 yang mengatakan bahwa:

Menurut saya Kami sudah berusaha bekerja dengan sebaik mungkin tetapi mungkin masih ada kinerja kami yang belum terlaksana dengan baik, dan untuk pengelolaan dan retribusi kami sudah mendisbustrikannya dengan baik
 (Wawancara, 27 Agustus 2020)

Tanggapan selanjutnya juga datang dari pengelolah retribusi pasar 2,5,dan 6 yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kinerja para pengelolah retribusi pasar memang belum maksimal tetapi sudah berusaha memaksimalkannya untuk bisa mengelolah retribusi pasar dengan baik.
 (Wawancara 27 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan para pengelolah retribusi pasar menurut mereka kinerja mereka sudah baik tapi memang belum maksimal dan menurut mereka untuk kedepannya mereka akan lebih berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik supaya retribusi pasar bisa terkelolah dengan baik. Karena jika sebuah kinerja para pengelolah pasar tersebut tidak efetif dan maksimal maka pengelolaan retribusi pasar tidak akan berjalan dengan baik dan dananya tidak akan terkelola dengan baik.

Selanjutnya menurut Informan dari Camat Benai yang mengatakan bahwa:

Saya sebagai camat benai sudah mengatakan kepada pengelolah retribusi pasar supaya bisa bekerja dengan maksimal dan efektif supaya pengelolaan retribusi pasar bisa berjalan dengan baik dan para pedagang disana bisa berdagang dengan nyaman
 (Wawancara 25 Agustus 2020)

Tanggapan selanjutnya datang dari lurah benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya para pengelolah retribusi pasar bekerja dengan sebagaimana mestinya tetapi mungkin masih ada beberapa dari mereka yang kurang bekerja dengan efektif sehingga menyebabkan terhambatnya pengelolaan retribusi pasar.
(Wawancara 25 Agustus 2020)

Dilihat dari hasil wawancara dengan semua informan diatas bahwa apakah para pengelolah retribusi pasar sudah bekerja dengan efektif dalam mengelolah retribusi pasar dan kesimpulan yang saya ambil yaitu para pengelola retribusi pasar memang belum bekerja dengan maksimal dan sepertinya masih banyak dari para pengelolah pasar yang belum tahu seperti apa tugasnya sehingga mereka tidak bekerja dengan maksimal, dan juga banyak terdapat penggelapan dana retribusi pasar sehingga pengelolaan retribusi pasar dengan baik.

Kesimpulan dari Indikator Pengorganisasian (Organizing) dilihat dari wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah struktur pengorganisasian di pasar benai belum maksimal dan para anggotanya belum bekerja dengan efektif sehingga pengelolaan pasar terhambat, bahkan para pedagang ada yang tidak mengetahui bagaimana struktur pengorganisasian di pasar benai .

Analisis Peneliti dari Indikator kedua ini yaitu Kualitas sumberdaya manusia yang ada di pasar benai ini menurut saya sudah memenuhi standar untuk bisa menjadi pembuat kebijakan kebijakan yang baik. Sedangkan kinerja para pengelolah retribusi pasar di pasar ini menurut saya belum efektif karena mereka tidak bekerja dengan sepenuh hati sehingga banyak hal yang menghambat pengelolaan retribusi pasar, juga di dalamnya juga terdapat penggelapan dana paara pengelolah pasar yang juga menghambat pengelolaan retribusi par untuk kedepannya diharapakan para pengelolah retribusi pasar lebih efektif dalam bekerja.

5.2.3 Indikator Kepemimpinan (Learning or Actuiting)

Kepemimpinan (Learning or Actuiting) berfungai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas- tugas yang esensial. Kepemimpinan termasuk di dalamnya oenggerang (actuiting) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas- tugasnya.

Pada indikator ini diambilah item penilaian sebanyak dua item yang dijadikan landasan pertanyaan pada wawancara terhadap informan, dengan pertanyaan yang **pertama**

Berikut hasil wawancara dengan informan yang berasal dari pedagang di pasar Benai yaitu Bapak Junaidi, ibu Rosmili, Ibu Suriyanti dan Bapak Samsul Basri dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Pemerintah selalu mesosialisaikan agar kita para pedagang untuk lebih tertib dalam menjaga fasilitas pasar supaya kondisi pasar lebih nyaman dan fasilitas pasar bisa tahan lebih lama dan bisa dipakai sebaik mungkin
 (Wawancara 26 Agustus 2020)

Masih sama dengan pertanyaan diatas informan dari pedagang lainnya yaitu bapak Jajang, Bapak Sumardi dan Ibu Ranti dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah selalu mengatakan untuk selalu menggunakan fasilitas pasar dengan baik dan selalu membayar ongkos retribusi pasar dengan lancar supaya ongkos retribusi pasar tersebut bisa di pergunakan untuk membeli atau membangun fasilitas pasar yang lain
 (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan pedagang/masyarakat diatas tentang bagaimana cara pemerintah dalam memotivasi pedagang dalam menjaga kondisi pasar menurut jawaban mereka pemerintah melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk selalu menjaga pasar dan fasilitas pasar supaya fasilitas tersebut bisa awet dan biar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu pemerintah juga memerintahkan untuk selalu tertib dalam membayar ongkos Retribusi pasar supaya dana tersebut bisa untuk membangun fasilitas pasar lainnya.

Menurut informan yang berasal dari Camat Benai yang mengatakan bahwa:

Kami sebagai pemerintah selalu mengatakan kepada para pedagang untuk selalu menjaga kondisi pasar supaya pegang pedagang itu sendiri bisa lebih nyaman dan kami juga selalu menyarankan untuk lebih tertib dalam membayar tarif retribusi pasar karena dana retribusi pasar tersebut untuk pembangunan di pasar tersebut.

(Wawancara, 25 Agustus 2020)

Sedangkan tanggapan dari lurah Benai yaitu Mengatakan bahwa:

Kami sebagai pemerintah hanya mengingatkan kepada masyarakat supaya sama-sama menjaga pasar itu sendiri, pergunakan fasilitas dengan baik, dan kumpulkan sampah dengan baik, dan jangan merusak fasilitas apapun dan tertib dalam membayar tarif retribusi pasar

(Wawancara 25 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan Camat Benai dan Lurah Benai diatas kesimpulan yaitu pemerintah juga menyarankan supaya lebih menjaga fasilitas pasar dengan baik dan menjaga kondisi pasar dengan nyaman sehingga semua pedagang juga nyaman, dan juga pemerintah juga menyarankan untuk tertib dalam membayar tarif retribusi pasar.

Sedangkan tanggapan yang diberikan oleh informan dari pengelolah retribusi pasar yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kami selalu menyarankan jangan merusak fasilitas pasar, jangan buang sampah sembarangan, dan tentunya tertid dalam membayar tarif reyribusi pasar.

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Sedangkan tanggapan yang diberikan oleh informan pengelolah retribusi pasar yang lain yang mengatakan bahwa:

Pemerintah selalu menyarankan kepada pedagang untuk tidak nakal jangan mencoba mengambil maupun merusak fasilitas maupun apapun yang ada di pasar, dan kami sebagai pengelolah retribusi pasar tentunya kami menyarankan kepada pedagang agar selalu tertib membayar tarif retribusi pasar yang mana nantinya akan dipergunakan untuk membangun fasilitas pasar lainnya.

(Wwancara, 27 Agustus 2020)

Peneliti melihat jawaban dari pemerintah tidak jauh berbeda dengan pedagang/masyarakat satu sama lainnya. Yaitu Para pedagang diharapkan sama-sama menjaga kondisis pasar supaya kondusif sehingga para pedagang nyaman dalam berjualan dan pedagang juga diharapkan dapat menjaga dan memakai fasilitas pasar dengan baik supaya lebih awet digunakan, dan pemerintah juga menyarakan kepada suapaya lebih trtib dalam membayar retribusi pasar.

Dan dari hasil observasi peneliti dilapangan berserta hasil jawaban dari wawancara peneliti dengan pedagang/masyarakat dan pemerintah memang benar bahwa pemerintah sering mensosialisasikan dan pemerintah juga menyarankan kepada para pedagang untuk menjaga fasilitas pasar. Cara pemerintah dalam memotivasi pedagang ini menurut saya sangat bagus karna hal tersebut sangat berpengaruh untuk para pedagang karna hal tersebut bisa membuat para pedagang bisa menjaga semua fasilitas yang ada sehingga fasilitas bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah juga menyarankan kepada para pedagang untuk membayar tarif retribusi pasar secara tertib supaya pengelolaan retribusi

pasar bisa terkelola dengan berkaitan dengan hal tersebut, pedagang juga berharap pemerintah juga cepat tanggap dalam mengelolah retribusi pasar supaya kondisi pasar bisa lebih baik.

Selanjutnya untuk item penilain **kedua** dengan pertanyaan “Menurut Bapak/ibu apakah pemerintah sudah mengimplementasikan dana retribusi pasar dengan baik?”

Berikut wawancara peneliti dengan informan yang berasal dari pedagang di pasar Benai yaitu Bapak Agus Salim ,Bapak Sumardi, Bapak Nardianto, dan Ibu Daniati dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Menurut saya mereka belum mengimplementasikannya dengan baik karena seperti yang terlihat pembangunan di pasar ini tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dan yang masuk tidak sesuai dengan dana yang keluar.

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Kemudian tanggapan yang hampir sama juga dikemukakan oleh informan dari pedagang yang lainnya dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Saya rasa belum, jika mereka sudah mengimplementasikannya dengan baik maka saat ini para pedagang tidak mengeluhkan fasilitas pasar yang belum semuanya ada.Saya rasa para pengelolah pasar kurang bisa mengelolah retribusi pasar dengan baik.

(Wawancara 26 Agustus 2020)

Dari Wawancara peneliti dengan para pedagang diatas kesimpulannya Pemerintah belum mengimplementasikan dana retribusi dengan baik karena menurut pedagang dana yang masuk tidak sama dengan dana yang mereka keluarkan untuk membangun fasilitas di pasar, hal ini menyebabkan banyaknya para pedagang yang mengeluh atas kejadian ini, karena menurut mereka

pemerintah tidak konsisten dalam mengelolah retribusi pasar, mereka merasa pemerintah kurang peduli terhadap pengelolaan retribusi pasar.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Camat Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kami sudah berusaha mengimplementasikan dan tersebut dengan sebagaimana mestinya tetapi hal tersebut mungkin masih terjadi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, karena kami sebagai pemerintah juga akan terus berusaha mengelolah retribusi pasar dengan baik.

(Wawancara 25 Agustus 2020)

Kemudian tanggapan yang lain juga dikemukakan Lurah Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pengimplementasian retribusi memang mengalami hambatan, tetapi bukan berarti pengelolan pasar tidak dilaksanakan, pengelolaan pasar sudah dijalankan tetapi mungkin belum maksimal.

(Wawancara 25 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan Camat Benai dan Lurah Benai diatas peneliti menyimpulkan pengimplementasikan retribusi pasar mengalami beberapa hambatan, tetapi menurut mereka dana retribusi sudah di kelolah oleh pengelolah retribusi tetapi pengelolaan tersebut belum maksimal.

Kemudian tanggapan yang hampir sama juga dikemukakan oleh informan dari pengelolah retribusi pasar 1, 4 dan 5 dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

kalau menurut saya kami sudah berusaha mengolah dana retribusi pasar dan mengimplementasikannya sesuai dengan sebagaimana mestinya tetapi pelaksanaan dilapangan memang masih lamban sehingga menyebabkan banyaknya komplen dari pedagang .

(Wawancara 27 Agustus 2020)

Kemudian tanggapan lain juga yang hampir sama dikemukakan oleh informan pengelolah retribusi pasar lain yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kami sudah mengeimplementasikannya dengan baik tapi belum maksimal pelaksanaannya.
(Wawancara,27 Februari 2019)

Dari Wawancara Peneliti dengan para pengelolah retribusi pasar diatas dapat diambil kesimpulan yaitu menurut mereka sudah diimplementasikan dana retribusi tersebut dengan baik, tetapi pembangunan dilapangan yang belum bekerja dengan baik, sehingga hal tersebut menghambat pembangunan beberapa fasilitas di pasar benai.

Karna peneliti melihat jawaban dari para imforman diatas serta hasil observasi peneliti dilapangan tidak jauh berbeda mengenai Apakah pemerintah sudah mengimplementasikan dana retribusi pasar dengan baik maka menurut peneliti pemerintah belum mengimplementasika dana tersebut dengan baik.

Analisis peneliti dari Indikator Ketiga ini yaitu Indikator Kepemimpinan melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah karakter pemerintah atau implementor sebuah program adalah hal terpenting dalam keberhasilan sebuah program. Disini saya menemukan karakter pemimpin atau pelaksana sebuah program yang kurang baik sehingga menyebabkan program tersebut tidak terlaksana. Sebenarnya jika para pelaksana program ini menyadari akan tugasnya dan memiliki tanggung terhadap pekerjaan mereka pasti pengelolaan retribusi pasar ini bisa teraksana dengan baik.

5.2.4 Indikator Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan . Atau

jugda dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Dan pada tipe ini diambil item penilaian sebanyak dua item yang dijadikan landasan pertanyaan pada wawancara terhadap informan dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu Apa yang dilakukan pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan masayarakat untuk tetap membayar retribusi pasar?”

Berikut hasil wawancara dengan informan yang berasal dari pedagang di pasar benai yaitu Bapak Samsul Basri, Bapak Junaidi, Ibu Ranti, Ibu Suriyanti dan Bapak Nardianto dengan jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Pemerintah selalu mengatakan dana retribusi pasar ini untuk kenyamanan dan untuk membangun fasilitas di pasar ini jadi kami sebagai pedagang wajib membayar tarif retribusi pasar tersebut .
(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Untuk pertanyaan sama, ini jawaban informan dari pedagang dipasar benai yang lain mengatakan jawaban yang hampir sama yaitu:

Para pengelolah retribusi pasar mengatakan ongkos retribusi pasar ini wajib di bayar supaya bisa berjualan di pasar ini, jadi kami sebagai pedagang hanya mematuhi aturan tersebut.
(Wawancara, 25 Agustus 2020)

Menurut wawancara diatas pemerintah dan pengelolah pasar mewajibkan para pedagang untuk membayar retribusi pasar sehingga para pedagang harus mematuhi aturan tersebut supaya bisa berjualan dipasarbenai tersebut, Sebagi gantinya nanti dan dari retribusi pasar tersebut akan dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas di pasar itu.

Sedangkan informan dari pengelolah retribusi pasar memberikan tanggapan dari pertanyaan ini yaitu :

Kami hanya menjalankan perintah dari pemerintah untuk memungut biaya yang akan dibebankan kepada para pedagang untuk bisa berjualan disana yang mana nantinya dana tersebut juga akan dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas di pasar itu.

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Sedangkan menurut informan dari pengelola retribusi pasar lain yang mengatakan bahwa:

Menurut saya pemerintah memberikan perintah untuk mewajibkan kepada para pedagang yang ingin berdagang untuk membayar tarif retribusi pasar yang mana nantinya dana tersebut juga untuk fasilitas di pasar.

(Wawancara 27 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan pengelola retribusi pasar diatas mereka mengatakan mereka memang mewajibkan kepada para pedagang untuk membayar retribusi pasar untuk para pedagang yang ingin berdagang yang mana nantinya dana Retribusi pasar ini akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas di pasar benai.

Kemudian tanggapan lain juga yang hampir sama dikemukakan oleh informan dari pedagang pasar benai yaitu Bapak Agus Salim mengatakan bahwa:

Pemerintah selalu mengatakan tarif retribusi ini untuk kepentingan bersama dan untuk kenyamanan berdagang di pasar, jadi kami sebagai pedagang diharuskan membayar ongkos retribusi pasar tersebut.

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Sedangkan tanggapan dari informan yang pedagang di pasar benai lainnya yang mengatakan bahwa:

Kata pengelolah pasar pemungutan retribusi pasar itu wajib jadi kami sebagai pedagang mengikutinya saja supaya bisa berdagang dengan nyaman. Kata mereka juga nantinya dana tersebut juga untuk pembangunan di pasar ini.

(Wawancara, 27 Agustus 2020)

Dari wawancara diatas tanggapan mereka semua mengatakan Tarif retribusi itu wajib dibayar supaya mereka bisa berdagang sehingga mereka semua harus mematuhi semua turan tersebut. Pemerintah juga mengatakan pembayaran tarif retribusi itu untuk kepentingan bersama yang nantinya dipergunakan untuk membuat fasilitas pasar.

Selanjutnya untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu apa yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan retribusi pasar ?”

Berikut hasil wawancara dengan informan yang pedagang yaitu ibu Suriyanti dan Bapak Nardianto yang mengatakan bahwa:

Menurut saya semuanya perlu ditingkatkan pelaksanaan karena menurut saya tidak ada proges apapun yang benar-benar terlaksana pelaksanaannya, fasilitas pasar pun belum memadai jadi pengelolah pasar harus benar-benar jujur..

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari pedagang lainnya dengan Jawaban yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

Saya rasa pengeluaran dan transparansi dana perlu di perjelas penggunaannya. Sehingga pedagang tidak sulit untuk membayar tarif retribusi. Pemerintah juga harus lebih cepat menangani masalah ini

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Begitu pula jawaban dari informan yang berasal dari pedagang di pasar yaitu bapak Jajang dan Ibu Ranti yang mengatakan bahwa:

Menurut saya semuanya perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dan pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas kinerjanya supaya semua program terlaksana.

(Wawancara 26 Agustus 2020)

Dari wawancara diatas tanggapan mereka mengatakan Harus ada transparansi pemakaian dana ini, supaya pedagang tidak merasa dana tersebut tidak di pergunakan dengan baik oleh pemerintah.

Sedangkan Tanggapan dari Pengelolah retribusi pasar yang mengatakan bahwa:

Kami sebagai pengelolah retribusi pasar pasti akan lebih meningkatkan kinerja kami, supaya hal ini tidak menjadi masalah kedepannya, dan saya sendiri pasti akan mengelolah retribusi pasar dengan sepenuh hati.

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Sedangkan tanggapan dari lurah benai yangmengatakan bahwa:

Menurut saya semua pengelolaan retribusi pasar ini memang perlu peningkatan pelaksanaannya supaya bisa memberdayakan masyarakat, dan yang saya lihat memang pemakaian dana retribusi belum maksimal.

(Wawancara 25 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan pengelolah retribusi pasar dan lurah benai menurut mereka semua mengatakan mereka akan meningkatkan kinerjanya masing-masing supaya pengelolaan retribusi pasar ini bisa terkelola dengan baik. Dan pemerintah juga berjanji untuk lebih mentranparansikan dana retribusi pasar supaya masyarakat percaya dan tidak merasa dirugikan akan hal ini.

Dari hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan yang relatif sama jawabannya dan peneliti juga melakukan observasi dilapangan bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat desasesuai dengan hasil observasi dilapangan dan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Para pedagang yang mengatakan bahwa semuanya perlu ditingkatka dari kinerja para pengelolah pasar sampai pemakaian dana yang harus ditransparansi supaya para pedagang bisa lebih percaya kepada pemerintah dan para pedagang lebih nyaman dalam berdagang.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dengan perangkat desa, masyarakat dan observasi peneliti dilapangan jawabannya sama. Jawaban dari hasil wawancara masyarakat dengan hasil observasi peneliti dilapangan sama. Jadi hasilnya adalah Analisis pengelolaan retribusi pasar di pasar benai belum terkelolah dengan baik.

Dilihat dari semua item penilain untuk melihat Analisis pengelolaan retribusi pasar , maka sesuai dengan indikator Pengelolaan Retribusi Menurut Sunho (dalam Alsar) Empat variabel tersebut adalah perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), kepemimpinan (Actuating) dan Pengeawasan (Controling) menunjukan Analisis pengelolaan retribusi pasar tidak terkelolah dengan baik, dengan beberapa kendala diantaranya pemerintah harus merencakan pengelolaan retribusi dengan baik supaya pasar menjadi lebih nyaman. Karena sejauh ini pemerintah belum mempergunakan dana retribusi dengan baik, pengelolaan retribusi pasar belum tercipta dengan baik karna masih adanya keterlambatan dari pengelolah retribusi pasar dalam menanganinya. Sehingga fasilitas di pasar benai belum memadai dan menyebabkan para pedagang kurang nyaman. Padahal para pedagang sudah membayar ongkos retribusi dengan rutin tetapi mereka merasa tidak ada feedback dari pembayaran tersebut, struktur pengorganisasian di pasar benai yang kurang bagus, tetapi terlepas dari itu semua para pedagang berharap yang terlibat pengelolaan retribusi pasar ini bisa bekerja dengan serius dan efektif, para pengelolah pasar tidak menggunakan dana dari retribusi pasar dengan efektif, dan mereka menduga adanya penggelapan dana dari retribusi pasar, hal ini terbukti dengan tidak adanya pembangunan di pasar Benai

yang berjalan dengan baik. Dan para pengelolah pasar tidak mengerjakan tugasnya dengan efektif mereka kurang peduli dengan pengeelolaan retribusi pasar, Pemerintah belum mengimplementasikan dana retribusi dengan baik karena menurut pedagang dana yang masuk tidak sama dengan dana yang mereka keluarkan untuk membangun fasilitas di pasar, hal ini menyebabkan banyaknya para pedagang yang mengeluh atas kejadian ini, karena menurut mereka pemerintah tidak konsisten dalam mengelolah retribusi pasar, mereka merasa pemerintah kurang peduli terhadap pengelolaan retribusi pasar, pemerintah dan pengelolah pasar mewajibkan para pedagang untuk membayar retribusi pasar sehingga para pedagang harus mematuhi aturan tersebut supaya bisa berjualan dipasarbenai tersebut, Sebagi gantinya nanti dan dari retribusi pasar tersebut akan dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas di pasar itu, Harus ada transparansi pemakaian dana ini, supaya pedagang tidak merasa dana tersebut tidak di pergunakan dengan baik oleh pemerintah.

5.3 Analisis Penelitian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Dan dari jawaban hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti mendapat jawaban dari setiap item penilaian dari setiap indikator yang ada, Dan peneliti dapat menyimpulkan mengenai Analisis pengelolaan retribusi pasar di pasar benai belum tercipta dengan baik dapat dilihat berikut ini:

5.3.1 Untuk jawaban atas indikator pertama yaitu Perencanaan (Planning) adalah adalah pemerintah memang harus merencanakan pengelolaan retribusi pasar dengan serius, sejauh ini memang pengelolaan retribusi

pasar belum tercipta dengan baik karna masih adanya keterlambatan dari pengelolah retribusi pasar dalam menanganinya. Sehingga fasilitas di pasar benai belum memadai dan menyebabkan para pedagang kurang nyaman. Padahal para pedagang sudah membayar ongkos retribusi dengan rutin tetapi mereka merasa tidak ada feedback dari pembayaran tersebut . Menurut peneliti pemerintah memang harus lebih serius dalam mengelolah retribusi pasar bukan hanya rencana tapi juga harus cepat tanggap dalam hal ini, sehingga pedagang bisa lebih tenang dan tidak merasa dibohongi atas pembayaran retribusi tersebut.

5.3.2 Untuk jawaban indikator kedua yaitu Pengorganisasian (Organizing) adalah struktur pengorganisasian di pasar benai belum maksimal dan para anggota nya belum bekerja dengan efektif sehingga pengelolaan pasar terhambat, bahkan para pedagang ada yang tidak mengetahui bagaimana struktur pengorganisasian di pasar benai . Kualitas sumberdaya manusia yang ada di pasar benai ini menurut saya sudah memenuhi standar untuk bisa menjadi pembuat kebijakan kebijakan yang baik. Sedangkan kinerja para pengelolah retribusi pasar di pasar ini menurut saya belum efektif karena mereka tidak bekerja dengan sepenuh hati sehingga banyak hal yang menghambat pengelolaan retribusi pasar, juga di dalamnya juga terdapat penggelapan dana paara pengelolah pasar yang juga menghambat pengelolaan retribusi par untuk kedepannya diharapakan para pengelolah retribusi pasar lebih efektif dalam bekerja.

- 5.3.3 Untuk Jawaban Indikator ketiga yaitu Kepemimpinan (Actuiting) adalah karakter pemerintah atau implementor sebuah program adalah hal terpenting dalam keberhasilan sebuah program. Disini saya menemukan karakter pemimpin atau pelaksana sebuah program yang kurang baik sehingga menyebabkan program tersebut tidak terlaksana. Sebenarnya jika para pelaksana program ini menyadari akan tugasnya dan memiliki tanggung terhadap pekerjaan mereka pasti pengelolaan retribusi pasar ini bisa teraksana dengan baik.
- 5.3.4 Untuk Jawaban indikator keempat yaitu Pengawasan (Controling) adalah Para pedagang mengatakan bahwa semuanya perlu ditingkatka dari kinerja para pengelolah pasar sampai pemakaian dana yang harus ditransparansi supaya para pedagang bisa lebih percaya kepada pemerintah dan para pedagang lebih nyaman dalam berdagang.

Kesimpulan dari Analisis Pengelolaan Retribusi pasar di Pasar Benai melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan melalui empat indikator diatas didapatkan hasilnya bahwa pengelolaan Retribusi Pasar belum terkelolah dengan baik. Hasil tersebut peneliti dapatkan dari hasil analisis peneliti melalui wawancara peneliti dengan Para Pedagang, Pengelolah pasar dan Camat Benai.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi belum terkelolah dengan baik.

6.1 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi adalah:

- 6.1.1 Untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan faktor-faktor penghambat atau pendukung tentang Pengelolaan Retribusi Pasar di pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.
- 6.1.2 Sebaiknya para pengelolah pasar dan pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya supaya pengelolaan retribusi pasar bisa terkelola dengan dengan baik.
- 6.1.3 Dalam rangka Menjalankan Kinerja sebagai pengelolah retribusi pasar para pengelolah retribusi supaya dapat terus meningkat kualitas pelayanan dengan memberikan dukungan, kenyamanan kerja sehingga terwujudkan pengelolaan retribusi yang baik sehingga pedagang merasa puas

- 6.1.4 Perlu adanya peningkatan pelaksanaan kualitas Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Retribusi Pasar di pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi..
- 6.1.5 Camat Benai selaku pimpinan tertinggi di kecamatan Benai harapkan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksaaan Pengelolaan retribusi pasar.
- 6.1.6 Petugas Pengelolah Retribusi pasar harus dapat mempertahankan Kualitas kinerjanya supaya tidak mengecewakan pedagang untuk kedepannya,

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Affifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta
- Ari, Dian Nugroho. 2017. *Pengantar Manajemen*. Penerbit UB Press
- Arsyat, Nurdjaman. Et.al. *Keuangan Negara*. Jakarta : Intermedia, 1992
- Atmojo, Bambang Tri.2004, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar*.
- Agustino, Leo. 2008. *Teori kebijakan Publik*. CV .Alfabeta: Jakarta
- Abdul Wahab. 2005. Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Aziz Muslim. 2009, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*,(Yogyakarta: Teras Kompleks POLRI Gowok Blok D 2 No 186),.
- Bambang, kesit, Prakoso,2005.*Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Bastian, Indra. *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Brynard, Petrus A. (2005) . *Policy Implementation: lesson for service Delivery* (paper of 27th AAPM Annual Roundtable Conference in Zambia).
- Caroline. 2005. *Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Yogyakarta: Gaya Media)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum).
- Djanius Djamin, 2010, *Pembangunan dan pengembangan Wilayah*, (Medan: USU Press).
- Erwan Agus Puwanto. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit Gava Media. Crtakan
- Hani Hikmat,2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press), cetakan ke-2
- Hanifa Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: 2002),
- Hikmat, R.Harry. 2010.*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi*.Bandung: Humaniora Utama Press.
- Islamy, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.*(Yogyakarta: Gaya Media)
- JohannesMuller,2008.*PerkembanganMasyarakat LintasIlmu,*(Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Umum).
- Kurdi. 2010. *Teori Organisasi.* Salemba Humanika. Jakarta
- Mardiasmo, 2011.*Konsep Pajak Daerah .*(Yogyakarta: Gaya Media)
- Nurdin Usman. 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,* (PT. Raja Grafindo Persada).
- Pasalong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik,* Bandung : Alfabeta
- Siahaan, 2013.*Teori Kebijakan Publik,* (Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Umum).
- Soetomo,2012, *Pembangunan Masyarakat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Syafiie, Inu Kencana , 2016. *Sistem Administrasi Negara.* Jakarta. PT Bumi Aksara
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan.* AAPI Puslit KP2W. Bandung.
- Ulber Silalahi. 2009, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Manajemen.* (Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Umum).
- Warwick, D.P. (2005). *Implentation in Eight Developing Countries.*Cambridge:Cambridge University Press.
- Widodo, 2001, *Implementasi Kebijakan,* (Bandung: CV Pustaka Pelajar).
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Media Presindo: Yogyakarta.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
- Undang-Undang No. 3 tahun 2002 Tentang Petunjuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Pasar

**Penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi**

Dokumenter pelaksanaan Penelitian di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 1: Wawancara Peneliti dengan Pengelolah Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 2: Wawancara Peneliti dengan Pengelolah Retribusi Pasar di Pasar Benai



Gambar 3: wawancara Peneliti dengan pedagang di Pasar Benai



Gambar 4: Wawancara Peneliti dengan salah satu Pedagang di Pasar Benai Kecamatan Benai



Gambar 5: Kondisi Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 6: Wawancara Peneliti dengan salah satu pedagang di pasar Benai



Gambar 7: Wawancara Peneliti dengan salah satu Pengelolah Retribusi Pasar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap CHINDY OKTARIA. Lahir di Benai pada tanggal 08 Oktober 1997 Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rizaldi dan Ibu Deslimarlinda. Penulis memiliki satu orang adik perempuan yaitu Chintya Oktari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. SDN 002 Pasar Benai, diselesaikan tahun 2010
2. SMP N 1 Benai, diselesaikan tahun 2013
3. SMAN 1 Benai, diselesaikan tahun 2016

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Adminitrasi Negara, yang berlokasi dijalan Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan. Selesai pada tahun 2020 dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*”

Teluk Kuantan, September 2020

Chindy Oktaria